



LAKIP

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2022
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Aries Fhariandi, S.sos. M.Si

Pembina Tk.I / IV.b
NIP.197904222003121009

IKHTISAR EKSLUSIF

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut, Adapun capaian kinerja persasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1

"Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan".

Indikator Sasaran Strategis, Target, Capaian dan Persentase capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.1 - Indikator, Target, Capaian dan Persentase Capaian Strategis 1

No	Indikator Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	<10	3,36	166,4
2	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	%	100	176	176
3	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar	%	<28	8	120
4	Pesentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen	%	100	88,46	88,46
5	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	US\$	1.550.202.475	3.065.305.281	197,7
6	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	US\$ (Ribu)	10.000.000	12.189.170	121,9
7	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	11.250	27.469	244,2
8	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	25	24	96
9	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	8,52	8,15	95,6
10	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilakukan	Kali	1	1	100

Capaian indikator tersebut diatas didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni program stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program standarnisasi dan perlindungan konsumen dan program pengembangan eksport.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSLUSIF	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	18
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2021.....	19
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021	24
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja berdasarkan IKU RPJMD Tahun 2021	25
3.3. Analisis Ketercapaian Kinerja indikator Program Tahun 2021	26
3.4. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 - Indikator, Target, Capaian dan Persentase Capaian Strategis 1	2
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel 2.2 – Kebutuhan Pegawai Pelaksana	16
Tabel 2.3 - Sarana dan Prasarana.....	16
Tabel 2.4 - Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan 2021	17
Tabel 3.1 - Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 Bidang Pedagangan dan Perindustrian	18
Tabel 3.2 – Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
Tabel 3.3 - Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan utamadalam pencapaian sasaran tahun 2021	20
Tabel 3.4 - Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	21
Tabel 3.5 – Perjanjian Kinerja Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	22
Tabel 3.6 – Jumlah total pagu Anggaran Disperindag Tahun 2021 per Program.....	23
Tabel 4.1 – Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	24
Tabel 4.2 - Capaian Kinerja Tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berdasar IKU RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2021	24
Tabel 4.3 - Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program Sasaran Strategis Pertama Tahun 2021	26
Tabel 4.4 – Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program Sasaran Strategis Kedua Tahun 2021	27
Tabel 4.5 – Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021	28

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 – POHON KINERJA	7
GAMBAR 1.2 – BAGAN STRUKTUR ORGANISASI.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap Instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP sebagai berikut:

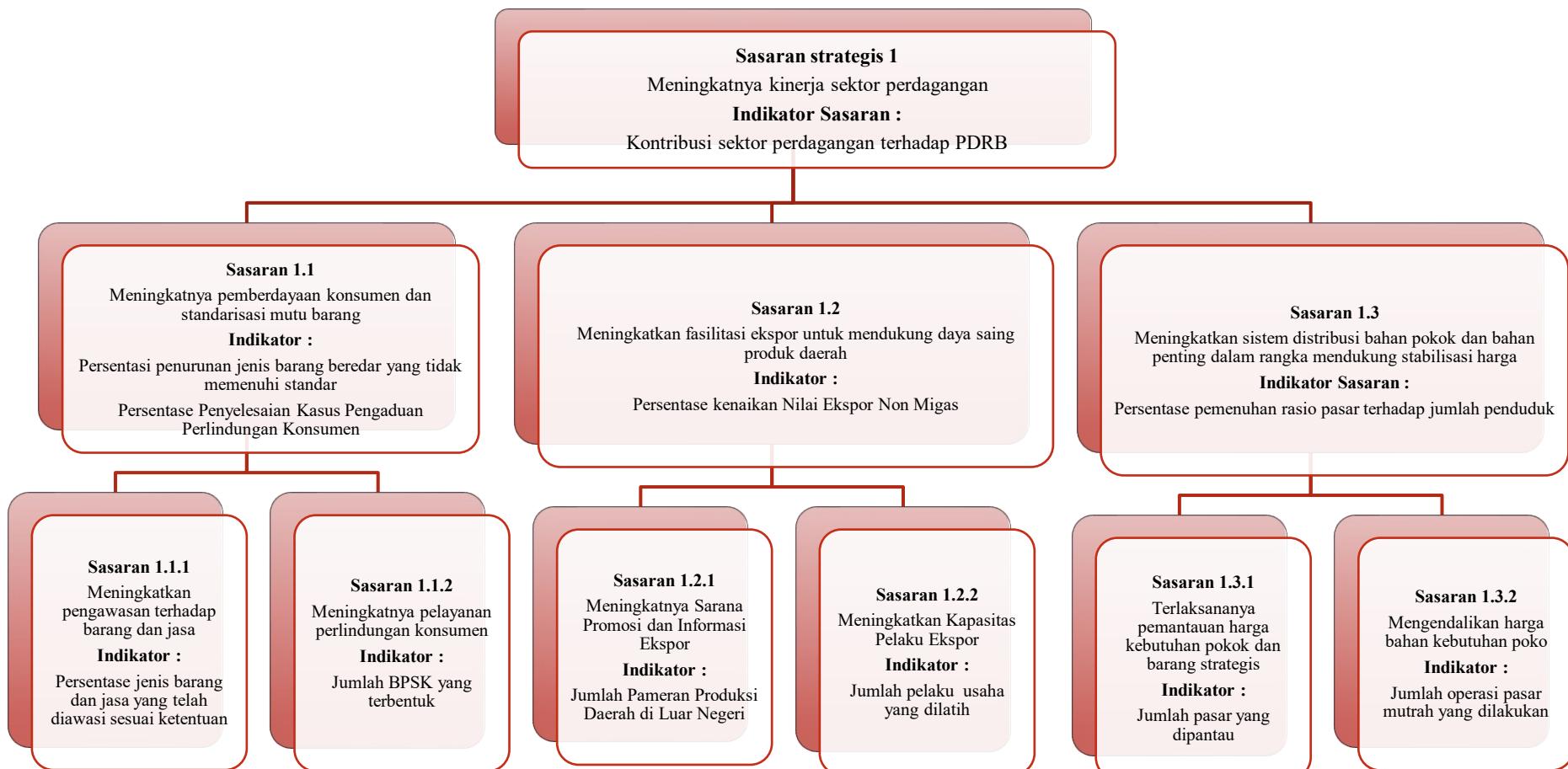
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. Pohon Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49).

Adapun pohon kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

GAMBAR 1.1 – POHON KINERJA





1.2. Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja dan struktur organisasi yang diatur didalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dijelaskan pada bagian keempat belas pasal 424 Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Fungsi :

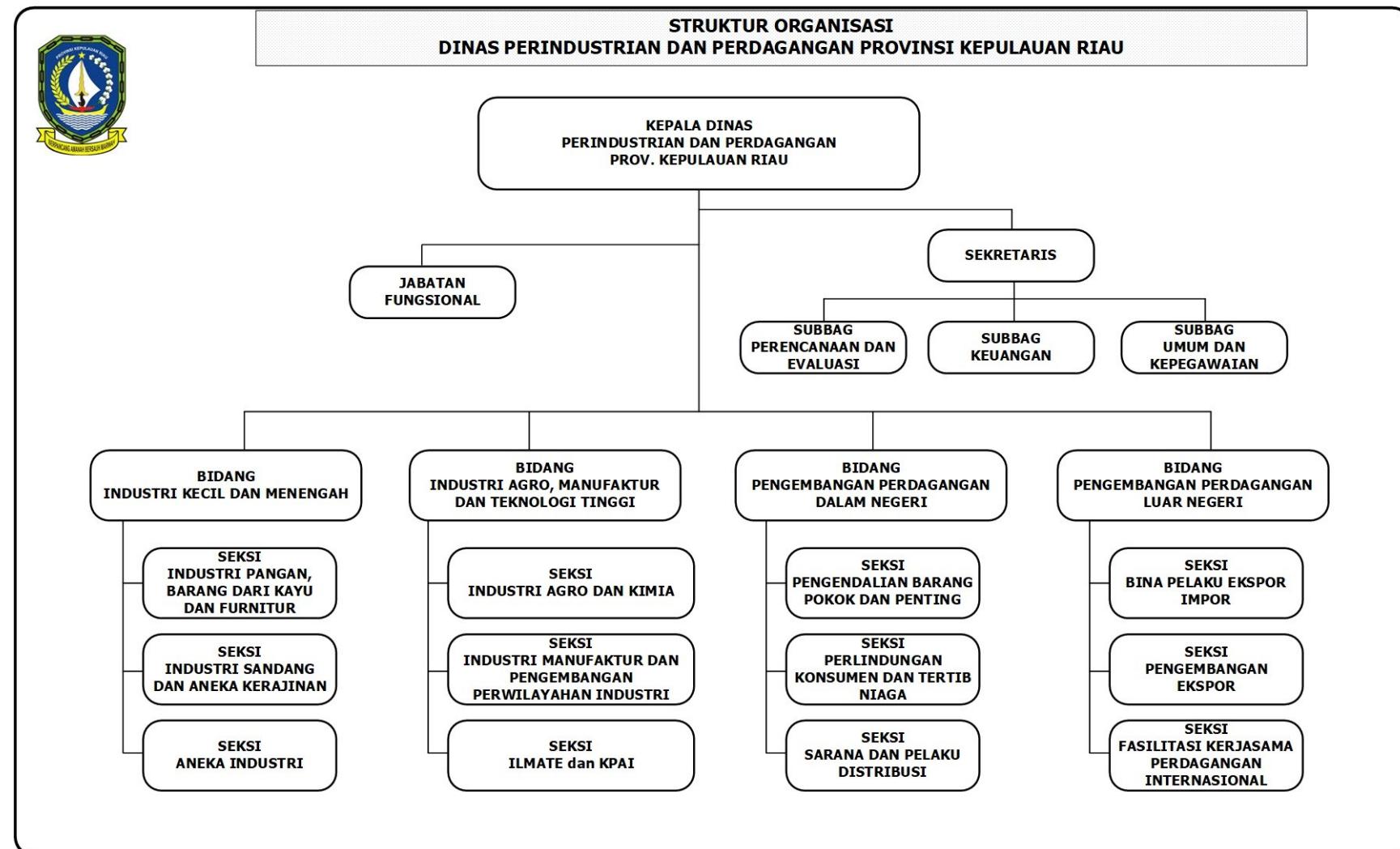
- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- f. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang urusan perindustrian dna perdagangan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan perindustrian dan perdagangan;

- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

GAMBAR 1.2 – BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.3. Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
3. Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut di pimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahi sub bagian dan seksi.

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan
 - 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Industri Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 2.1. Seksi Industri Pangan, Barang dari kayu dan Furnitur
 - 2.2. Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan
 - 2.3. Seksi Aneka Industri
3. Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 3.1. Seksi Industri Agro dan Kimia
 - 3.2. Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahian Industri
 - 3.3. Seksi Industri ILMATE dan KPAI

4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 4.1. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - 4.2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - 4.3. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 5.1. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor
 - 5.2. Seksi Pengembangan Ekspor
 - 5.3. Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari 1 (satu) jabatan fungsional, yaitu Arsiparis.

1.4. Strategi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi", antara lain sebagai berikut :

1. Birokrasi Pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Terwujudnya birokrasi Pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan desain kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang- undangan, manajemen SDM aparatur, dan budaya kerja yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Jabatan Struktural						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	✓	
2	Sekretaris Dinas	1	S1	1	S2	✓	
3	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1	S1	1	S1		✓
4	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1	S1	1	S1	✓	
5	Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah	1	S1	1	S2		✓
6	Kepala Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi	1	S1	1	S2		✓
7	Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	1	S1	1	S1		✓
8	Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi	1	S1	1	S1		✓
9	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga	1	S1	1	S1	✓	
10	Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor	1	S1	1	S1		✓
11	Kepala Seksi Pengembangan Ekspor	1	S1	1	S2	✓	
12	Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional	1	S1	1	S1		✓
13	Kepala Seksi Industri Pangan, Barang dari kayu dan Furnitur	1	S1	1	S1	✓	
14	Kepala Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan	1	S1	1	S1		✓
15	Kepala Seksi Aneka Industri	1	S1	1	S2		✓
16	Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia	1	S1	1	S1		✓
17	Kepala Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahkan Industri	1	S1	1	S2	✓	
18	Kepala Seksi ILMATEK dan PAI	1	S1	1	S1	✓	
19	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1	S1	1	S2	✓	
20	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1	1	S1		✓
21	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S2	✓	

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Jabatan Pelaksana						
22	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3	S1	1	S1	✓	
23	Verifikator Keuangan	2	D3	1	S1		✓
24	Bendahara	3	S1	1	S1		✓
25	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	2	S1	1	S1		✓
26	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri Dan Usaha Perdagangan	1	S1	1	S1	✓	
27	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	4	S1	4	S1	✓	✓
28	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	1	S1	1	S1		✓
29	Pengelola Distribusi Dan Pemasaran	1	D3	1	D3		✓
30	Pengelola Fasilitasi Dan Mediasi Dan Perlindungan Konsumen	1	D3	1	D3	✓	
31	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan	1	S1	1	S1		✓
32	Analisis Industri	1	S1	1	S1		✓
33	Analisis Akses Industri	2	S1	1	S1		✓
34	Pengelola Data Pameran Dan Kemitraan	1	D3	1	D3		✓
35	Pengelola Data Kreatifitas Dan Inovasi	2	D3	2	D3		✓
36	Pengawas Industri	2	S1	1	S1	✓	
37	Analisa Industri Dan Pencegahan Pencemaran	1	S1	1	S1	✓	
C	Jabatan Fungsional						
43	Arsiparis Muda	1	S1	1	S1		✓

Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 27 orang (65%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (19%), D3 6 orang (14%) dan S3 sebanyak 1 orang (2%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 17 orang (41%) lebih sedikit dibanding pegawai perempuan sebanyak 24 orang (59%). Jabatan struktural berimbang dijabat laki-laki dan perempuan. Pejabat Struktural laki-laki sebanyak 11 orang (51%) dan Pejabat Struktural Perempuan sebanyak 10 orang (49%). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.2 – Kebutuhan Pegawai Pelaksana

No	Nama Jabatan	Formasi	
		Jumlah	Kualifikasi
A.	Jabatan Pelaksana		
1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	S1
2	Verifikator Keuangan	1	S1
3	Bendahara	2	S1
4	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	1	S1
5	Analisis Akses Industri	2	S1
6	Pengawas Industri	1	S1
7	Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri	1	S1
8	Analisis Mutu Produk	1	S1
9	Fasilitator Perdagangan	1	S1
10	Penyusun Rencana Akses Pasar	1	S1
11	Penyusun Perkembangan Harga Dan Pengkajian Pasar	1	S1
12	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	1	S1
13	Analisis Dunia Usaha	2	S1
14	Analisa Kerjasama Industri	1	S1
15	Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri	1	S1
16	Analisis Industri	1	S1
17	Pemeriksa Industri	1	S1
18	Penyusun Rencana Kerjasama Industri	1	S1
19	Analisis Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	1	S1
20	Analisis Teknologi Industri	1	S1
21	Pengelola Pameran Dan Peragaan	2	D3
22	Pengelola Data	1	D3
23	Pengadministrasian Identifikasi Dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	1	D3
	Jumlah	28	

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal, Masih dibutuhkan sekitar dua puluh delapan orang lagi berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang sudah disusun.

Tabel 2.3 - Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	0 Unit	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	965 Unit	6.603.505.041,00
3.	Gedung dan Bangunan Jalan	3 Unit	137.400.000,00
4.	Irigasi dan Jaringan	2 Unit	12.283.800,00
5.	Aset Tetap Lainnya	4 Unit	2.217.246,870
6.	Aset Lainnya	3 Unit	656.077.200,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah didukung oleh sarana berupa perlengkapan dan peralatan kantor. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 2.4 - Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2020	Rp. 8,288,174,423,00	Rp. 128,575,801,308,00	Rp. 136,863,975,731,00
2021	Rp. 8,135,618,464,00	Rp. 10,437,233,798,00	Rp. 18,572,852,262

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Terlihat pada tabel 2.4, untuk tahun 2021, pada tahun 2020 terlihat besaran alokasi anggaran yang signifikan, hal ini disebabkan karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Bantuan Sosial bagi Masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2021 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan kembali.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49).

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017-2021 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017–2021.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah dengan Tujuan: Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Terkait hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan strategis selama lima tahun adalah :

Tabel 3.1 - Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 Bidang Pedagangan dan Perindustrian

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2016	Target Tahunan					Target Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,52
2	Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasi bahan baku lokal	Jumlah Industri berbahan baku lokal	Unit	1.276	1.720	18.50	1.969	2.117	2.200	2.200

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 – Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan2. Meminimalisasi dampak negatif FTZ dalam pengembangan perdagangan antar kabupaten/kota melalui pemberian saran dan masukan penyempurnaan kebijakan Pemerintah pusat terkait dampak FTZ tersebut.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.
2	Meningkatnya Kuantitas Produksi Industri Pengolahan Berbasis Bahan Baku Lokal	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta meningkatkan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan dan industri semikonduktor sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan kawasan industri, Teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2021

Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 - Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan utamadalam pencapaian sasaran tahun 2021

No	Program/Kegitan/Subkegiatan	Pagu	Keterangan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
1.1	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</i>		
1.1.1	<u>Pameran Dagang Internasional/Nasional</u>	11.660.000	APBDP
1.1.2	<u>Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</u>	137.508.556	APBDP
1.1.3	<u>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</u>	236.789.500	APBDP
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
2.1	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</i>		
2.1.1	<u>Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</u>	736.715.500	APBDP
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
3.1	<i>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>		
3.1.1	<u>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</u>	1.250.164.435	APBDP
4.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
4.1	<i>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>		
4.1.1	<u>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen</u>	105.000.000	APBDP
4.2	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
4.2.1	<u>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen</u>	670.116.640	APBDP
5.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
5.1	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>		
5.1.1	<u>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi</u>	189.890.000	APBDP
5.1.2	<u>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</u>	1.883.955.177	APBDP
5.1.3	<u>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</u>	842.935.130	APBDP
Total		6.064.734.938	

Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan pendukung tercapainya sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 - Struktur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
<i>1.1</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
1.1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.350.000	APBDP
1.1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.757.268.464	APBDP
<i>1.2</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
1.2.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	APBDP
1.2.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.717.200	APBDP
1.2.3	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.903.400	APBDP
1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.836.300	APBDP
<i>1.3</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.490.000	APBDP
1.3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.450.000	APBDP
<i>1.4</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.013.000	APBDP
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.493.500	APBDP
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.297.332.960	APBDP
<i>1.5</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
1.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.736.300	APBDP
1.5.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.526.200	APBDP
Total		12.508.117.324	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang merepresentasikan kinerja Instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 3.5 – Perjanjian Kinerja Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan	Fluktuasi Harga Bahan Pokok (%)	< 10
		Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk (%)	100
		Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar (%)	25
		Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (%)	100
		Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri (juta US\$)	1.550,2
		Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau (ribu US\$)	10.000.000
		Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA (SKA)	11.250
		Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor (jenis)	25
		Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	8.52
2	Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang (sentra)	10
		Jumlah Industri Besar (unit)	795
		Jumlah kawasan industri (Kawasan)	27
		Jumlah Kelompok Klaster Industri (Klaster)	1
		Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal (%)	12,38
		Kontribusi Industri Tanpa Migas terhadap PDRB (%)	38.50
		Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa Migas (orang)	136.970
		Jumlah industri kecil dan Menengah (unit)	3000
		Jumlah industri berbahan baku lokal (unit)	2200

Tabel 3.6 – Jumlah total pagu Anggaran Disperindag Tahun 2021 per Program

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 385.958.056	APBDP
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 736.715.500	APBDP
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 1.250.164.435	APBDP
4.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 775.116.640	APBDP
5.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 2.916.780.307	APBDP
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.12.508.117.324	APBDP
	Total	Rp.18.572.852.262	APBDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 – Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3.	$66 \leq 75$	Sedang	S
4.	$51 \leq 65$	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 4.2 - Capaian Kinerja Tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berdasar IKU RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2021				Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persen	Kode	
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,52	8,15	95,6	ST	8,52
2	Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasi bahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	2200	2200	100	ST	2200

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategic diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan

Kinerja sasaran meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri diukur dengan indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Sumber data diperoleh dari data nilai sektor perdagangan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal

Tolok ukur capaian sasaran strategis diukur dari hasil kegiatan Pendataan dan Pengembangan Database IKM Provinsi Kepulauan Riau dari program yang kegiatannya berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis tahun 2021

3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja berdasarkan IKU RPJMD Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 - Capaian Kinerja Tahun 2021, dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1:

Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran pertama RPJMD yaitu Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 8,52% dengan realiasi capaian sebesar 8,15%. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor hanya tumbuh sebesar 1,07% dari tahun 2020 hal ini disebabkan oleh hambatan rantai pasokan global ditengah kenaikan permintaan, kebijakan fiscal terbatas dinegara berkembang dan penurunan pendapatan serta investasi ditengah masa pandemi. Namun jika dilihat dari nilai sector perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 4,23% dari nilai tahun 2020 sebesar 21.561.951,27 (dalam rupiah) menjadi 22.474.868,28 (dalam rupiah) pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya pelonggaran aktivitas fisik saat pandemi sehingga permintaan meningkat dan juga didukung peningkatan kinerja ekspor yang memberikan nilai tambah cukup besar terhadap sector perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 26,92% dari nilai ekspor tahun 2020 sebesar 9,77 miliar US\$ menjadi 12,40 miliar US\$ pada tahun 2021.

2. Sasaran strategis 2 :

Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada Sasaran Strategis kedua Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal sudah dapat

mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 hal ini disebabkan oleh meningkat kinerja Industri kecil dan menengah diberbagai sektor dikarena kebijakan pelonggaran pembatasan aktifitas sosial hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kebijakan Pemerintah dengan memberikan stimulus keuangan, digitalisasi sistem pemasaran, kemudahan dan penyederhanaan pengurusan perizinan karena Pengembangan IKM perlu terus menjadi prioritas karena kontribusinya yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan.

3.3. Analisis Ketercapaian Kinerja indikator Program Tahun 2021

Tabel 4.3 - Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program Sasaran Strategis Pertama Tahun 2021

No	Indikator Strategis	Satuan	Target	Realisasi	%	Status Capaian
1	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	<10	3,36	166,4	ST
2	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	%	100	176	176	ST
3	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar	%	<25	8	120	ST
4	Pesentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen	%	100	88,46	88,46	T
5	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	US\$	1.550.202.475	3.065.300.00	197,7	ST
6	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	US\$ (Ribu)	10.00.000	12.189.170	121,9	ST
7	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	11.250	27.360	244,2	ST
8	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	25	24	96	ST
9	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	8,52	8,15	95,6	ST
10	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilakukan	Kali	1	1	100	ST

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator program yang mendukung capaian strategis pertama RPJMD Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan, dari sepuluh indikator program yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas Sembilan indikator yang capaian kinerjanya sangat tinggi dan satu indikator yang capaian kinerjanya tinggi, Adapun program yang mendukung tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk;
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator, Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar, Pesentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen;
4. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri, Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau, Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA, Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor, Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilakukan.

Dan dukungan anggaran sebesar Rp.3.147.954.631 untuk keseluruhan program di atas yang mendukung pencapaian target capaian kinerja tersebut dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan yang bertujuan antara lain untuk menjaga stabilisasi harga kebutuhan barang pokok, pemantauan distribusi barang, pengawasan barang beredar dan jasa dan beberapa fasilitasi perdagangan serta perlindungan konsumen.

Sembilan indikator yang capainnya sangat tinggi didukung oleh meningkatnya kinerja perdagangan yang disebabkan oleh mulai diberlakukannya pelonggaran aktivitas fisik saat pandemi sehingga permintaan meningkat dan juga didukung peningkatan kinerja ekspor dan satu indikator capainnya tinggi adalah dari 78 kasus sengketa konsumen 8 kasus lanjut ke pengadilan sedangkan 68 kasus dapat diselesaikan di Majelis BPSK Provinsi Kepri.

Tabel 4.4 – Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program Sasaran Strategis Kedua Tahun 2021

No	Indikator Strategis	Satuan	Target	Realisasi	%	Status Capaian
1	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	10	8	88,99	T
2	Jumlah Industri Besar	Unit	795	730	91,8	ST
3	Jumlah kawasan industri	Kawasan	27	34	125,93	ST
4	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	1	1	100	ST
5	Jumlah kegiatan koordinasi pada sektor industri	Kegiatan	1	1	100	ST
6	Kontribusi Industri Tanpa Migas terhadap PDRB	%	38,50	42,03	112,55	ST
7	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa Migas	Orang	136.970	124.214	90,66	T
8	Jumlah industri kecil dan Menengah	Unit	3.000	3.000	100	ST
9	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	2.200	2.200	100	ST
10	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	12,38	12,38	100	ST

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator program yang mendukung capaian strategis kedua RPJMD Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasi bahan baku lokal, dari sepuluh indikator program yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas delapan indikator yang capaian kinerjanya sangat tinggi dan dua indikator yang capaian kinerjanya tinggi, dengan dukungan satu program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan dukungan anggaran Rp. 2.916.780.307. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian tersebut antaralain. Perencanaan pembangunan industri Provinsi yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah (RPIP Provinsi Kepulauan Riau), Pembinaan IKM dalam bentuk Pelatihan-pelatihan bagi ikm, wirausaha baru ikm dan fasilitasi design kemasan IKM, monitoring industri besar, Rekomendasi atas Izin untuk industri baru serta pemuktahiran data dan informasi industri.

Untuk capaian kinerja yang sangat tinggi didukung oleh bertambahnya jumlah perusahaan baru di kawasan industri baru, mulai meningkatnya permintaan pasar global, meningkat kinerja Industri Kecil dan Menengah diberbagai sektor dikarena kebijakan pelonggaran pembatasan aktifitas sosial hampir diseluruh wilayah Indonesia, memberikan stimulus keuangan, digitalisasi sistem pemasaran, kemudahan dan penyederhanaan pengurusan perizinan.

3.4. Realisasi Anggaran

Tabel 4.5 – Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan		Pagu	Realisasi	%	Status Capaian
1.	Total Belanja Program			18.572.852,262	17.851.409.455	96,12	ST
I.	Program Pengembangan Ekspor	1	Pemeran Dagang Internasional/Nasional	11.660.000	11.580.000	99,31	ST
		2	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	137.508.556	136.227.100	99,07	ST
		3	Pembinaan Pelaku Ekspor	236.789.500	231.350.150	97,70	ST
II	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Pembinaan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	736.715.500	703.049.482	95,43	ST
III	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5	Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	1.250.164.435	1.201.510.500	96,11	ST
IV	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	670.116.640	583.757.539	87,11	T
		7	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa	105.000.000	103.996.500	99,04	ST

No.	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Status Capaian
		sesuai Parametr Ketentuan Perlindungan Konsumen				
V	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	189.890.000	136.170.600	71,71	S
		9 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasara Industri	1.883.995.177	1.768.780.310	93,89	ST
		10 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	842.935.130	830.323.192	98,50	ST
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	7.757.268,464	7.577.299.719	97,79	ST
		12 Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.350.000	378.350.000	100	ST
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.100.000	8.100.000	100	ST
		14 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	395.526.200	388.043.050	98,11	ST
		15 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.903.400	206.050.000	97,24	ST
		16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.836.300	126.542.800	99,77	ST
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.717.200	752.466.088	95,04	ST
		18 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	72.000.000	72.000.000	100	ST
		19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.013.000	32.309.000	84,99	T
		20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.493.500	54.881.500	92,25	ST

No.	Program	Kegiatan		Pagu	Realisasi	%	Status Capaian
		21	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.297.332.960	2.735.274.102	93,78	ST
		22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.490.000	235.187.100	90,63	T
		23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.450.000	95.445.000	99,99	ST

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tercapai dengan Sangat tinggi sebesar 96,12% sebesar Rp.17.851.409.455 dari total pagu anggaran Rp.18.572.852.262. Anggaran ini tentunya mendukung pencapaian semua target indikator Program yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian Sasaran startegis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut ini :
 - a. Penetapan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah *Free Trade Zone* (FTZ), khususnya pada wilayah Batam, Bintan, dan Karimun yang secara langsung berdampak pada peningkatan dan perluasan perdagangan barang dan jasa di wilayah tersebut. Hal ini belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang merata pada wilayah FTZ dan Non FTZ.
 - b. Peningkatan volume barang beredara yang merupakan dampak berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan maraknya perdagangan online belum dimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya secara optimal.
 - c. Kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen yang merupakan salah satu kunci berkembangnya sektor perdagangan masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus sengketa konsumen yang diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setiap tahunnya.
 - d. Jumlah industri kecil yang semakin meningkat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan belum dapat dipenuhi seluruhnya dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau / tergantung pasokan dari daerah lain. Kompleksitas permasalahan sumber daya manusia IKM masih perlu ditingkatkan seperti inovasi produk, penguatan penguasaan teknologi dalam mengakses pasar Nasional maupun Internasional, standarisasi dan sertifikasi produk-produk IKM di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 didukung faktor-faktor sebagai berikut ini :
 - a. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor.
 - b. Meningkatnya permintaan global
 - c. Stimulus dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah, Pemerintah pusat dan stakeholder lainnya juga memicu peningkatan kinerja sektor industri.
 - d. Penumbuhan dan pengembangan IKM dari Pemerintah pusat dilakukan melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Industri.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- a. Mendorong sinergi Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai;
- b. Peningkatan frekuensi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu;
- c. Peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran BPSK.
- d. Pemenuhan bahan baku industri dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing.
- e. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri serta dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM.
- f. Fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan Industri besar dan penyedia modal serta melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi legalitas usaha yang merupakan syarat dalam bermitra dengan penyedia modal